

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan hasil negara yang bersal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasila tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidika dan kesejatron. Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah sala satu bagian dengan kepentingan umum. Pajak megurani penghasilan kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, perolehaan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat. Dalam pemungutan pajak, terdapat pihak-pihak (orang maupun badan) yang dikenakan pajak atau disebut sebagai subyek pajak sedangkan segala sesuatu yang akan dikenakan pajak disebut obyek pajak. Penentuan subyek dan obyek pajak dilihat dari jenis pajak yang dipungut seperti: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBn), pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehaan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Keberadaan UMKM sebagai salasatu sektor pendorongan peningkatan perekonomian nasional dan daerah dibuktikan dengan kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan ketidak stabilan perekonomian. Dibidang perpajakan UMKM memang memungkinkan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara, namun besar pendapatannya tidak terlalu besar, didapatkan jumlah

pendapatan kena pajak akan meningkat karena bertambah dan berkembangnya jumlah UMKM.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia, selain dikenal sebagai sektor yang tahan terhadap krisis UMKM memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Di tengah krisis yang terjadi UMKM terbukti relatif lebih mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan krisis ekonomi dibandingkan dengan banyak usaha berskala besar. Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan di tengah krisis moneter yang terjadi. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Kekuatan UMKM dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia tidak disadari oleh berbagai pihak dalam hal perkembangannya.

Zulia Hanum (2010) melakukan penelitian tentang *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Kota Medan* dengan hasil menunjukkan bahwa faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak tentang pajak, pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak.

Widayati (2010) melakukan penelitian tentang *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada KPP Prama Gambir Tiga* dengan hasil

menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gambir Tiga, Tapi faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy Endrianto, 2015). Penelitian ini sebanyak 3.291 Pelaku UMKM di Kabupaten Kupang yang memiliki bidang Usaha yang berbeda – beda yang terdapat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang. (*sumber : Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kupang*).

Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Pelaporan pajak khususnya bagi perusahaan yang berbadan hukum dengan pendapatan penghasilan, seharusnya dapat memproyeksikan sisi profit yang diterima. Wajib pajak badan sendiri diharapkan dapat melaporkan peredaran usahanya dan juga total penghasilan lain diluar usahanya dalam SPT Tahunan. Dan data secara kualitas mengenai peredaran usaha dan penghasilan lain secara real, sepatutnya disampaikan dengan benar oleh wajib pajak. Di lain pihak, pada sisi fisik pelaporan pajak secara berkala mempunyai peran yang sangat penting. Pelaporan pajak berkala ini mempunyai tujuan awal dari pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam tahap menuju akuntabel diperlukan pembenahan-pembenahan sistem data

lokasi dan potensi yang tentu valid juga. Bagi Direktorat Jendral Pajak data – data ini sangat penting demi mencapai keadilan yang merata bagi masyarakat dan digunakan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan – kebijakan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi di indonesia. Jadi dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UMKM DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KABUPATEN KUPANG”**

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten Kupang.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka perumusan persoalan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pemilik usaha mikro, kecil dan menengah untuk melaporkan pajak di Kabupaten Kupang?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pemilik usaha mikro, kecil dan menengah untuk melaporkan pajak Kabupaten Kupang?

1.4. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pemilik usaha mikro, kecil dan menengah untuk melaporkan pajak di Kabupaten Kupang?
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pemilik usaha mikro, kecil dan menengah untuk melaporkan pajak di Kabupaten Kupang?

1.4.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan, menambah literatur dan pengembangan teori di bidang perpajakan khususnya pada UMKM, dan menjadi bahan referensi dan acuan bagi yang berminat melakukan penelitian ini menyangkut Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten Kupang.

b) Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten

Kupang.

- Bagi pemerintah memberikan mamfaat bagi Direktorat Jendral Pajak sebagai evluasi sebagai program selanjutnya dalam rangkameningkatkan.
- Bagi UMKM dapat menambah informasi terkait pelaporan perpajakan serta meningkatkan UMKM di Kabupaten Kupang untuk membayar pajak sebagai bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan wajib pajak.